



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bangsa yang lekat dengan primordialisme, agama menjadi salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Kepercayaan agama tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan sosial, namun juga turut mempengaruhi hukum, hingga politik. Implementasi dalam kehidupan politik sendiri tak lepas dari konsep agama. Tujuannya agar kehidupan politik berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah agama sehingga tercipta iklim politik yang harmonis.

Agama juga kerap menjadi faktor yang memberi legitimasi pada kekuasaan politik dan pemerintahan. Kepercayaan dan agama dijadikan tolak ukur kelayakan kepemimpinan seseorang. Hal ini dapat terlihat dari jabatan pemerintahan dan dunia politik yang kerap didominasi oleh pemeluk agama mayoritas. Akibatnya di Indonesia, sistem demokrasi yang ada sering kali kurang memberi ruang kepada pemimpin non-muslim.

Dengan persentase penduduk muslim mencapai 88,1%, Indonesia memiliki basis pemilih muslim yang besar pula. Masyarakat cenderung mengutamakan pemimpin berdasarkan kesamaan ideologi dan identitas agama karena dirasa mampu mewakili, memenuhi, serta merealisasikan keinginannya (Fitirana, 2012).

Minimal, hal ini dapat diwujudkan dengan kesamaan-kesamaan tertentu, termasuk dalam hal kepercayaan.

Pemimpin non-muslim dalam hal ini, diragukan mampu mewakili aspirasi masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Berdasarkan survei, hanya dua dari sepuluh Muslim Indonesia yang tidak keberatan jika dipimpin presiden beragama Kristen (Mujani, 2007:165). Sementara terhadap kelompok lain yang tidak disukai, dalam hal ini Komunis, Yahudi, Kristen/Katolik, Cina dan Islamis Muslim, 80 % menolak kelompok yang tidak mereka sukai berada di pemerintahan, dan 83 % menolak kelompok ini menempati jabatan publik (Mujani, 2007:167).

Sentimen agama seperti inilah yang sering dimanfaatkan kompetitor untuk memenangkan pemilihan. Seperti isu yang mencuat ketika Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selain merupakan warga keturunan, Ahok juga merupakan seorang Nasrani. Identitas dan kepercayaannya sempat memunculkan keraguan dan cemoohan dari berbagai pihak, termasuk dari pihak lawan, Fauzi Bowo.

Hak berpartisipasi dalam politik pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara. Dalam undang-undang pemilihan presiden maupun legislatif pun tidak terdapat limitasi kepada warga non-muslim untuk menjadi seorang pemimpin. Namun dalam praktiknya, hak-hak politik pemimpin non-muslim sering kali dikesampingkan, sementara isu SARA terus dimunculkan.

Selain dalam kehidupan politik dan pemerintahan, bangsa plural ini juga tak lepas dari berbagai permasalahan diskriminasi terhadap pemeluk kaum minoritas. Dalam laporan berjudul *In Religion's Name : Abuses against Religious Minorities in Indonesia* yang dirilis oleh Human Rights Watch, secara lebih luas terjadi peningkatan pelanggaran terhadap kaum agama minoritas.

Setiap tahunnya terjadi peningkatan penyerangan terhadap kaum minoritas , termasuk Kristen serta minoritas Muslim Ahmadiyah dan Syiah. Setara Institute melaporkan kenaikan serangan terhadap minoritas agama, dari 244 pada tahun 2011 menjadi 264 pada tahun 2012. The Wahid Institute, lembaga pemantau yang berbasis di Jakarta, mendokumentasikan 92 pelanggaran kebebasan beragama dan 184 insiden intoleransi agama di 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 134 insiden intoleransi pada tahun 2010. Adapun kekerasan yang terjadi berupa penyerangan fisik, pembakaran, penutupan rumah ibadah maupun diskriminasi dalam urusan administrasi negara, pendidikan dan pelayanan sosial.

Few Forum on Religion and Public Life, Amerika Serikat pada Desember 2009 merilis laporan indeks kebencian sosial atau *social hostilities index* yang melibatkan agama di Indonesia, tergolong sangat tinggi. Indonesia menempati urutan kelima dari 171 negara. Data ini menunjukkan tingginya potensi konflik keagamaan di Indonesia sekaligus menjadi ironi bagi citra Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi religiusitas dan pluralisme (Suranto, 2010 : ix-x).

Karenanya kasus diskriminasi masih terus terjadi dan kerap menjadi agenda pemberitaan media. Hingga yang terbaru, pemberitaan mengenai kasus penolakan Lurah Susan oleh warga Lenteng Agung. 29 Agustus 2013 lalu, Koran Tempo memberitakan ratusan orang yang mengatasnamakan warga Lenteng Agung berunjuk rasa di depan kantor kelurahan. Unjuk rasa yang dinamakan aksi damai tersebut menolak keputusan hasil lelang jabatan yang diadakan oleh Pemprov DKI. Penempatan Lurah Susan Jasmine Zulkifli dianggap sebagian warga tidak tepat. Bukan karena kredibilitas maupun kompetensinya, melainkan karena agama yang diyakininya.

Pemerintah provinsi DKI dianggap kurang bijaksana menempatkan Lurah Susan yang beragama Nasrani di tengah masyarakat Lenteng Agung yang mayoritas Muslim. Berbagai alasan lain dibuat-buat untuk mencari kesalahan lurah modis ini. Di antaranya mengganti ucapan salam Assalamualaikum dengan *good morning* yang dianggap tidak mencerminkan kesopanan. Agama yang dianutnya juga dianggap membuat Lurah Susan tidak dapat menghadiri pengajian di rumah warga sehingga tidak terjadi silaturahmi antara lurah dengan masyarakat setempat. Bahkan Lurah Susan juga dianggap mencederai Pancasila (tidak nasionalis) karena tidak memasang bendera Merah Putih pada 17 Agustus lalu di depan kelurahan Lenteng Agung (Harahap : 2013).

Pada dasarnya, isu ini memang layak diberitakan. Setiap berita di media memiliki karakteristik intrinsik yang dikenal sebagai nilai berita (*news value*). Nilai berita menjadi ukuran untuk menentukan sebuah peristiwa layak berita (*newsworthy*).

Peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai berita misalnya yang mengandung konflik, bencana dan kemajuan, dampak, kemasyhuran, human interest dan aneka nilai lainnya (Luwi Ishwara : 2007, 53). Kasus penolakan Lurah Susan oleh warga Lenteng Agung ini layak diberitakan karena mengandung nilai berita yakni konflik, *human interest*, dan kedekatan.

Konflik menjadi salah satu nilai berita yang paling umum ditemui. Kebanyakan konflik adalah layak berita (Luwi Ishwara : 2007, 53). Dalam peristiwa ini tidak terjadi konflik secara fisik. Konflik yang muncul berupa benturan kepentingan dan pandangan antara Lurah Susan dan warga Lenteng Agung. Konflik ini ditandai dengan demonstrasi warga yang meminta Lurah Susan untuk turun dari jabatannya karena dianggap tidak memenuhi sosial kultural daerah tersebut.

Selain mengandung konflik, peristiwa ini juga memiliki *human interest* karena menyinggung unsur SARA, isu lama yang masih sangat sensitif bagi bangsa plural ini. Kapabilitas seseorang dalam jabatannya, dalam hal ini tidak dilihat berdasarkan kemampuannya, melainkan berdasarkan keyakinannya.

Hal ini tentu saja menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan, antara mereka yang berpikiran terbuka demi kemajuan bangsa dan mereka yang berjuang untuk kepentingan kelompoknya. Unsur *human interest* dapat terlihat dari dampak pemberitaan yang bisa mengundang rasa empati masyarakat, atau reaksi sebaliknya. Pada akhirnya, peristiwa ini hanya kembali mengukuhkan peran agama dalam kehidupan politik di Indonesia.

Selain konflik dan *human interest*, kedekatan (*proximity*) juga menjadi salah satu ukuran yang diterapkan pada berita untuk menentukan apakah berita tersebut layak dihimpun (Luwi Ishwara : 2007, 55). Unjuk rasa warga di depan kantor kelurahan Lenteng Agung secara geografis memang hanya berdampak bagi warga Jakarta. Hal ini terlihat dari mengalirnya dukungan warga dan tokoh masyarakat setempat kepada Lurah Susan.

Namun karena mengandung isu SARA, peristiwa ini juga mengundang simpati dan pendapat dari berbagai kalangan masyarakat. Timbul kedekatan psikologis, terutama bagi kaum pemeluk keyakinan serupa, kaum perempuan, atau para aktivis yang sadar akan kebebasan beragama yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia dan dijamin dalam konstitusi.

Berangkat dari peristiwa ini, penulis ingin meneliti bagaimana media mengkonstruksi isu sensitif terkait SARA. Dari berbagai media nasional yang memberitakan penolakan terhadap Lurah Susan ini, penulis memilih Koran Tempo. Surat kabar harian ini dipilih penulis karena Koran Tempo selalu memberikan porsi pemberitaan yang lebih menonjol terhadap isu-isu tekanan dan anarkisme yang terkait dengan keyakinan minoritas. Secara khusus, Koran Tempo juga intens melaporkan perkembangan kasus penolakan Lurah Susan oleh warga Lenteng Agung mulai dari edisi 24 Agustus 2013 hingga 2 Oktober 2013.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melihat bagaimana Koran Tempo mengkonstruksi kasus penolakan Lurah Susan oleh warga Lenteng Agung yang

sarat dengan unsur SARA dan politis. Karena itu penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode framing.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Koran Tempo mengkonstruksi kasus penolakan terhadap Lurah Susan oleh warga Lenteng Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui konstruksi berita pada Koran Tempo mengenai kasus penolakan terhadap Lurah Susan oleh warga Lenteng Agung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat semakin memperkaya khasanah penelitian komunikasi, khususnya jurnalistik. Kontribusi dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya Teori Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat mengenai bagaimana teks berita yang menyangkut isu SARA dan

diskriminasi agama diproduksi oleh media. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi media dalam mengkonstruksi pesan yang berkaitan dengan isu sensitif di masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini hanya kepada artikel berita terkait penolakan Lurah Susan oleh warga Lenteng Agung dalam Koran Tempo edisi 24 Agustus 2013 hingga 2 Oktober 2013.

UMMN